

**EVALUASI ANGKUTAN PERDESAAN DI
KABUPATEN SUMENEP DARI SEGI TRAYEK,
SARANA DAN PRASARANA
(STUDI KASUS JALUR SUMENEP – KALIANGET)**

Dara Adistia Sahara¹

H. Darma Jasuli, MT.²

Ir. Abdul Muthalib Farajd.³

¹ Mahasiswa Fakultas teknik, Universitas Wiraraja email :
Dara.AS@gmail.com

² Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas Wiraraja
email : DarmaJasuli.DJ@gmail.com

³ Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas Wiraraja
email : AbdulMuthalib.Farajd@gmail.com

Abstrak

Minimnya perhatian pemerintah Kabupaten Sumenep menyebabkan angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget tidak berkembang sehingga peneliti mengkaji dan mengevaluasi angkutan perdesaan dari segi trayek, sarana maupun prasarana guna meningkatkan kualitas angkutan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data survey lapangan dan data dinas. Hasil penelitian menunjukkan dari 75 angkutan yang beroperasi diantaranya 30 angkutan layak, 24 tidak layak, dan 21 tidak diketahui. Rute operasi angkutan adalah Pasar Anom Baru – Kalianget dan Pasar Bangkal – Kalianget. Angkutan tidak singgah di terminal Arya Wiraraja serta tidak ada informasi trayek. Hasil analisa kuesioner dari pelayanan keamanan 39,08% cukup memuaskan, 100% sopir tidak menggunakan tanda pengenalan dan 67,82% tidak terdapat informasi trayek. Dari pelayanan keselamatan 44,83% cukup memuaskan, 100% kondisi sopir sehat dan 97,70% sopir piawai mengemudikan angkutan. Dari pelayanan kenyamanan 33,33% kurang nyaman, 41,38% sirkulasi udara dalam angkutan kurang baik, 35,63% angkutan kurang bersih, dan 88,51% tempat duduk cukup memadai. Dari pelayanan keterjangkauan 58,62% tarif angkutan murah, 35,63% cukup mudah menyetop angkutan dan 64,37% angkutan menjangkau tujuan. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa dari segi trayek rute angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget masih perlu dikembangkan untuk menjangkau semua pusat kegiatan di wilayah Sumenep, dari segi sarana angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget juga belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan perdesaan dan harus dibenahi dari segi fisik, selain itu dari segi prasarana, terminal Arya Wiraraja tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

Kata kunci : Rute, Sarana, Prasarana.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 27 kecamatan dengan jumlah penduduk 1.055.101 jiwa (Data Statistik 2012) menjadikan sistem transportasi yang sangat penting. Terutama bagi masyarakat daerah kecamatan yang umumnya hidup dari kegiatan bertani hingga industri rumah tangga memerlukan akses termudah, termurah dan tercepat ke wilayah kota untuk menjual hasil produksinya. Maka angkutan umum sangat perlu diperhatikan guna melayani kepentingan mobilitas masyarakat perdesaan. Kecamatan Kalianget misalnya, jarak tempuh yang lumayan jauh dari kota membuat angkutan perdesaan dibutuhkan. Pemerintah terkesan acuh tak acuh terhadap angkutan umum perdesaan dan cenderung memikirkan angkutan perkotaan.

Minimnya perhatian pemerintah Kabupaten Sumenep menyebabkan kurang berkembangnya angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget dapat dilihat dari keberadaannya di sembarangan tempat. Oleh karena itu evaluasi terhadap trayek, sarana dan prasarannya dapat menjadi upaya awal guna meningkatkan kualitas angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget.

1.2. Rumusan Masalah

Evaluasi angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget terfokus pada permasalahan : Bagaimana pelayanan dari segi trayek, sarana dan prasarana, apa saja permasalahan yang ada di dalamnya dan upaya apa yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitasnya.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan angkutan perdesaan di Kabupaten Sumenep jalur Sumenep – Kalianget dari segi trayek, sarana dan prasarana. Mengetahui masalah apa saja yang ada di dalamnya dan menentukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitasnya.

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan akan bermanfaat dapat memberikan gambaran atau informasi yang objektif kepada pemerintah tentang harapan masyarakat terhadap angkutan perdesaan yang proporsional, baik dan tepat sasaran serta menjadi tolak ukur untuk evaluasi penyelenggaraan angkutan perdesaan di seluruh trayek di Kabupaten Sumenep.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Rute Angkutan Perdesaan Trayek Sumenep – Kalianget

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat 2 jalur tetap yakni Pasar Anom Baru – Kalianget dan Pasar Bangkal – Kalianget.



Gambar 1. Rute Angkutan Pasar Anom – Kalianget (Google Maps, Non Skala)

2.2. Sarana Angkutan Perdesaan Trayek Sumenep – Kalianget

Data sekunder yang peneliti dapat dari Dinas Perhubungan berupa tabel daftar angkutan perdesaan yang beroperasi di Kabupaten Sumenep Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Angkutan Pedesaan yang Beroperasi di Kab.Sumenep 2014

Trayek	Jarak (km)	Kebutuhan Armada	Realisasi Armada	Sisa Armada	Jenis Kendaraan	Kinerja				
						Jumlah Armada Operasi	Rata – Rata Rit/hari	Load Factor (%)	Rata – Rata Kec (km/jam)	Waktu Operasi / hari
Kota Sumenep – Kalianget PP	11	75	75	0	MP U	75	2	55	40	12

Sumber : Dinas Perhubungan

Jenis mobil yang digunakan pada angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget adalah Suzuki Carry dan Mitsubishi Colt L300.

Peneliti melakukan survey lapangan terkait kelayakan angkutan dengan mengecek masa berlaku uji muatan dan kondisi fisik dari angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget.

Hasil survey menunjukkan 30 angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget masa uji muatannya masih berlaku, 24 unit sudah tidak berlaku dan 21 unit tidak diketahui.

Survey kondisi fisik angkutan menunjukkan banyak kerusakan pada angkutan mulai dari karat pada besi, tuas pintu yang rusak, dan karung kursi yang robek. Selain itu masih digunakan kursi kayu dan keberadaan bagasi tidak digunakan. Barang bawaan penumpang justru diletakkan di tempat penumpang dan di atas angkutan.

Survey kinerja angkutan dilakukan selama 2 hari yakni pada Senin, 25 Mei 2015 dan Sabtu, 30 Mei 2015 dengan asumsi senin menunjukkan hari sibuk dan sabtu menunjukkan hari libur.

Hasil analisa kinerja angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget yang ditunjukkan tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi *overtime* pada waktu henti yang menyebabkan waktu sirkulasi angkutan menjadi 105% lebih lama dari waktu sirkulasi terkontrol.

Pelayanan angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget dianalisa dari hasil kuesioner penumpang. Jumlah responden sebanyak 25% dari jumlah penumpang pada periode sibuk.

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah Responden} &= 25\% \times 349 \\
 &= \frac{25}{100} \times 349 \\
 &= 87,25
 \end{aligned}$$

Pelayanan kemandirian angkutan ditunjukkan dengan penggunaan tanda pengenal oleh sopir angkutan, keberadaan informasi trayek yang dilayani pada angkutan beserta identitas angkutan berupa plat nomor kuning pada angkutan.

Pelayanan kesetaraan angkutan ditinjau dari pemberian pelayanan prioritas untuk kemudahan naik dan atau turun kendaraan bagi semua penumpang khususnya bagi lansia, penyandang cacat, anak-anak dan wanita hamil. Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa pelayanan kesetaraan angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget sudah terpenuhi

Pelayanan keteraturan angkutan ditinjau dari informasi pelayanan dan kinerja operasional. Untuk informasi pelayanan dapat dilihat dari keberadaan informasi tarif dan trayek yang dilayani. Hasil survey peneliti menunjukkan tidak satupun angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget yang memasang info trayek di bagian depan dan belakang angkutan.

2.3. Upaya Peningkatan Angkutan Perdesaan Trayek Sumenep – Kalianget Dari Segi Trayek

Berpatokan pada rute angkutan maka hal yang dapat dilakukan adalah membagi rute angkutan sehingga dapat menjangkau semua lokasi pusat kegiatan di Kabupaten Sumenep.

2.4. Upaya Peningkatan Angkutan Perdesaan Trayek Sumenep – Kalianget Dari Segi Sarana

Kelayakan dan kondisi fisik angkutan dapat diupayakan dengan pengawasan atau pengecekan terhadap angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget. Serta dengan perbaikan angkutan.

Kinerja angkutan diupayakan dengan penargetan waktu henti selama 10 % dari waktu perjalanan

2.5. Upaya Peningkatan Angkutan Perdesaan Trayek Sumenep – Kalianget Dari Segi Prasarana

Prasarana angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget berupa jalan dan terminal tidak perlu

ditingkatkan tinggal bagaimana aparat pemerintah menertibkan angkutan untuk masuk ke area terminal agar tidak memakan lahan pengguna jalan lain.

3. KESIMPULAN

Penelitian dan analisa yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa rute operasi angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget memiliki 2 jalur tetap yakni Pasar Anom Baru – Kalianget dan Pasar Bangkal – Kalianget. Sarananyamengalamibanyak kerusakan, *overtime* pada waktu henti, dan pelayanannyarendah. Angkutan perdesaan trayek Sumenep – Kalianget sudah melalui jalan yang sesuai yakni jalan nasional, jalan kabupaten dan jalan desa akan tetapi tidak memanfaatkan keberadaan terminal Arya Wiraraja.

Permasalahan pada aspek trayek adalah tidak adanya pembagian rute operasi. Permasalahan pada sarananya yakni terdapat banyak kerusakan, *overtime* di waktu henti dan pelayanannya masih kurang nyaman serta tidak ada info mengenai trayek maupun tarif pada angkutan.Prasarana berupa terminal Arya Wiraraja kurang maksimal dalam dimanfaatkan.

Aspek trayek dapat diupayakan dengan pembagian rute. Kinerja angkutan dapat ditingkatkan dengan penargetan waktu henti sebesar 10 % dari waktu perjalanan. Standar pelayanan angkutan dapat dipenuhi dengan penerapan penggunaan tanda pengenalan pada sopir angkutan, pemasangan informasi trayekdan tarif,penyediaan fasilitas pada angkutanserta dengan pemaksimalan bagasi untuk barang penumpang. Prasarana terminal Arya Wiraraja dapat dimanfaatkan dengan maksiman dengan penertiban angkutan masukke area terminal.

4. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Prof.Dr.Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Jakarta : Rineka Cipta.

Kamarwan, Sidharta S., *Sistem Transportasi*, Gunadarma.
Manurung, Binsar G.P., 2007, *Evaluasi Transportas Angkutan Umum Perdesaan*, Medan : Universitas Sumatera Utara.

Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, *Kewenangan Yang Diserahkan Pemerintah Pusat Kepada Kabupaten/Kota Bidang Transportasi Darat*, <http://hubdat.dephub.go.id/spesial-konten/otonomi-daerah/40-standar-pelayanan-minimal-untuk-kewenangan-yang-diserahkan-kepada-kabupatenkota>, (diakses pada tanggal 10 April 2015).

Republik Indonesia, Menteri Perhubungan, PM No. 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Republik Indonesia, PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.